

## MASUK KAJIAN BAPPENAS, PROGRAM SSH DAN MAKAN GRATIS DI MAYBRAT DIAPRESIASI PEMERINTAH PUSAT



*radioidola.com*

Pemerintah pusat mengapresiasi program sekolah sepanjang hari (SSH) dan makan gratis di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Program ini telah dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan akan menjadi program nasional untuk pemerintah saat ini dan masa depan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu menyatakan bahwa dalam situasi ini, Pemkab Maybrat siap untuk melanjutkan. Ia menjelaskan bahwa SSH dan makan gratis mulai dilaksanakan pada tahun 2023 di dua wilayah yaitu Kampung Suswa dan Ayawasi. Meskipun, anggaran saat itu masih terbatas sebesar Rp3 miliar namun program dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2024, program SSH dilanjutkan lagi yang mana Dinas Pendidikan masih mengalokasikan anggaran yang sama senilai Rp3 miliar. Program makan gratis juga disiapkan anggaran tersendiri senilai Rp5 miliar yang mana alokasinya buat pengadaan kacang hijau, susu, beras dan berbagai makanan lain untuk seluruh sekolah di Kabupaten Maybrat. Menurut Kornelius Kambu, Pj Bupati, Bernhard E Rondonuwu mengapresiasi implementasi program ini serta meminta makin ditingkatkan. Ia menyatakan program SSH dan makan gratis sudah berjalan di Kabupaten Maybrat, jika pemerintahan baru memiliki program yang sama, maka hanya perlu mengubah kebijakan yang ada.

Kornelius Kambu mengatakan Pj Bupati Maybrat begitu cepat melihat persoalan pendidikan sehingga melakukan inovasi dan terobosan yang luar biasa. Inovasi harus didukung oleh seluruh *stakeholder*, baik masyarakat di sekitar lingkungan sekolah maupun lembaga-

lembaga pemerhati pendidikan lainnya, diantaranya dari pihak gereja, seperti Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK). Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan yang baik juga berarti menjamin kesehatan anak-anak dengan makanan yang baik dan fasilitas lainnya, masyarakat harus mendukung program pemerintah dan tidak melepaskan sepenuhnya kepada pemerintah.

Kornelius Kambu mengatakan di Kampung Suswa dan Ayawasi program tersebut sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh masyarakat sekitar, pemerintah distrik, kepala kampung, guru, gereja, dan intelektual. Begitu juga di tempat lain, sehingga program pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Maybrat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, terutama anak-anak Kabupaten Maybrat, menuju Papua Cerdas, Sehat, dan Sejahtera. Orang Papua tidak boleh berdiam diri. Jika ada program pemerintah yang baik didukung sepenuhnya karena apa yang dilakukan pemerintah tidak mungkin merugikan masyarakat, melainkan memberikan dampak yang sangat baik.

#### **Sumber Berita:**

*Harian Tribun Sorong, Masuk Kajian Bappenas, Program SSH dan Makan Gratis di Maybrat Diapresiasi Pemerintah Pusat, tanggal 9 Maret 2024* atau melalui link <https://sorong.tribunnews.com/2024/03/09/masuk-kajian-bappenas-program-ssh-dan-makan-gratis-di-maybrat-diapresiasi-pemerintah-pusat>

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Lampiran menjelaskan bahwa:

- pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 4) penguatan daya saing usaha; 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan 8) pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

- Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah tahun 2024. Rencana kerja Pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.